

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yang dibuat selaras pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi sarana penting dalam mengevaluasi keadaan serta kinerja perusahaan. Laporan ini memberikan data terkait faktor-faktor seperti kemampuan membayar utang, profitabilitas, dan tingkat keamanan finansial. Informasi ini didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan yang mencakup laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas. Pengguna informasi, khususnya pemangku kepentingan, selanjutnya akan menggunakan laporan ini untuk mengumpulkan informasi pendukung keputusan mengenai organisasi. Pengguna laporan keuangan terutama menaruh perhatian dan memberikan perhatian khusus pada informasi yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan; informasi tersebut juga dapat digunakan oleh dunia usaha untuk menilai kinerja dan akuntabilitas manajemen.

Keberhasilan ekonomi suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh inovasi, efisiensi, dan kualitas manajemennya, namun juga oleh kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi dan berdampak positif terhadap efektivitas internalnya (Tadesse, 2004). Namun, kurangnya transparansi dan praktik pengungkapan yang buruk mengurangi efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Meskipun demikian, Skandal-skandal korporasi yang menonjol dan krisis keuangan di seluruh dunia telah menegaskan manfaat kerangka tata kelola perusahaan yang efektif dalam meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dan kinerja perusahaan (Ehikioya, 2009).

Pada tahun 1997, saat Indonesia dihadapkan pada krisis ekonomi, perhatian terhadap tata kelola perusahaan mulai meningkat. Tata kelola perusahaan yang kurang baik menjadi contoh faktor yang menyebabkan krisis ekonomi (Manurung et al., 2019). Masalah yang juga lazim terjadi di sektor perbankan Indonesia adalah masalah tata kelola perusahaan. Masalah ini dapat menimbulkan banyak kontroversi keuangan, termasuk contoh penyelewengan, penipuan, pencurian, dan

korupsi yang dilakukan oleh bank. Maka dari itu, penerapan tata kelola perusahaan menjadi penting, khususnya dalam meningkatkan kinerja keuangan (Tjua & Masdjojo, 2022).

Dalam perekonomian Indonesia, industri perbankan berperan penting sebagai penghimpun dan pendistribusi dana di masyarakat (Afandi & Amin, 2019). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, manajemen bank berupaya untuk menerapkan kehati-hatian dan profesionalisme. Kesalahan dalam pengelolaan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat (Alfriska & Haryani, 2011). Peran penting sektor perbankan dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan ekonomi yang berkesinambungan ditunjukkan oleh adanya dominasi sektor perbankan pada industri keuangan nasional (Satyagraha et al., 2022). Sebagai lembaga intermediasi, bank wajib menunjukkan kinerja yang terpuji. Nasabah lebih cenderung memiliki kepercayaan pada lembaga keuangan yang menunjukkan kinerja kuat sebagai agen kepercayaan, dengan tujuan utama memfasilitasi dan memperkuat operasional bisnis. Nilai atau standar perusahaan akan meningkat secara signifikan melalui operasi perbankan yang terorganisir (Krisetiawati, 2021). Kinerja dapat merupakan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan perekonomian guna memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Perhitungan rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi kinerja suatu bank yang dilaporkan dalam laporan keuangannya (Lupa et al., 2016).

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bagian integral dari sistem perbankan nasional dan berperan signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BPD memiliki peran dan fungsi penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan BPD untuk mendirikan dan mengelola jaringan layanan di wilayah-wilayah di mana bank swasta mungkin tidak ekonomis untuk beroperasi. Jika dibandingkan dengan bank lain, BPD memiliki keunikan dan keistimewaan, terutama dalam hal kepemilikan serta visi dan misi yang diemban. Saham BPD bukan merupakan kekayaan perseorangan atau perusahaan swasta, melainkan dimiliki pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Visi dan misi BPD lebih dari sekedar upaya memaksimalkan keuntungan dan

meningkatkan nilai organisasi serta memenangkan pinjaman pemegang saham di bank umum lain, tetapi lebih meningkatkan peran mereka sebagai agen pembangunan daerah. Artinya, kinerja BPD harus dapat dicapai dengan ikut serta memecahkan berbagai masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, khususnya di wilayah operasional masing-masing (Akyuwen et al., 2019). Namun, di tengah dominasi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional, berbagai kajian menyebutkan bahwa keberadaan BPD dalam perekonomian nasional, khususnya perekonomian daerah, masih tergolong rendah (Fettry et al., 2018).

Berdasarkan Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank Tahun 2018–2020 yang dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih optimal dalam mendukung perekonomian daerah. Hal ini disebabkan adanya temuan beberapa permasalahan dari pemeriksaan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan perolehan dana dari pihak ketiga (DPK). Temuan pemeriksaan memperlihatkan bank belum menjalankan strategi atau program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dana dan jumlah rekening sesuai dengan rencana bisnisnya. Berikut ini berkaitan dengan fungsi kompensasi. Saat ini, tidak ada ketentuan dalam kebijakan BPD yang mewajibkan pemberian kredit dan pembiayaan yang memadai kepada usaha produktif. Selain itu, BPK mengidentifikasi permasalahan terkait alokasi dana. Alokasi dana yang ada saat ini tidak sesuai dengan cetak biru yang diberikan bank. Selain itu, kemajuan menuju penguatan permodalan masih jauh dari harapan, dan masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, BPD dinilai belum melakukan standarisasi dan pemetaan kategori produk dan layanan untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah (wartapemeriksa.bpk.go.id, 2021).

Selain hal tersebut di atas, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten juga tengah menghadapi fenomena kredit bermasalah. Pada tahun 2017, dua terdakwa korupsi Bank Banten dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang atas keterlibatannya dalam penipuan penyaluran kredit investasi (KI) dan kredit modal kerja (KMK) kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM). Mantan

Kepala Divisi Komersial Bank Banten Satyavadin Djojostuboro dan Direktur PT HNM Rasyid Samsudin divonis bersalah dan selanjutnya mendapat hukuman masing-masing tiga dan sebelas tahun penjara (detik.com, 2023).

Mengingat kejadian ini, efektivitas tata kelola perusahaan sangat penting agar industri perbankan dan perekonomian secara umum dapat beroperasi. Subyek tata kelola di bank sangatlah penting karena potensi permasalahan yang menjalar ke semua sistem perbankan serta apabila meluas bisa membuat stabilitas keuangan terganggu (Brogi & Lagasio, 2019). Selain itu, terdapat harapan bahwa penerapan praktik tata kelola yang baik dalam industri perbankan akan mengurangi kejadian skandal keuangan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan calon investor terhadap sistem pengendalian internal, dan mendorong peningkatan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang positif menandakan bank memiliki tata kelola yang baik (Tjua & Masdjojo, 2022).

Keberadaan dan kesuksesan dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari praktik tata kelola yang baik. Kinerja perusahaan yang unggul sangat dipengaruhi oleh praktik tata kelola yang diterapkan. Tata kelola perusahaan yang efisien sangat penting bagi dunia usaha agar mereka dapat menjaga keunggulan kompetitif serta memastikan kelangsungan bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan bisnis sekarang serta mendatang. Indikasi membaiknya kinerja organisasi adalah jika organisasi melakukan aktivitas yang menghasilkan keuntungan lebih intensif (Pahlawan et al., 2018). Studi ini menyoroti koneksi politik, direktur di luar perusahaan, komisaris independen, dan gender direksi, sebagai faktor tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kinerja BPD, dan peran moderasi inovasi keuangan.

Koneksi politik berdampak pada perilaku organisasi dan merupakan aspek eksternal mekanisme tata kelola perusahaan (Joni et al., 2020). Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh koneksi politik dari anggota direksi dan komisarisnya. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah berdampak terhadap pengambilan keputusan dan kegiatan operasional perusahaan (Ding et al., 2014). Perusahaan di negara berkembang menghadapi beberapa tantangan serta beroperasi pada lingkungan yang tidak pasti, dan pemerintah berperan dalam melakukan

pengendalian terhadap alokasi sumber daya (Faccio, 2006). Sehingga untuk mengatasi konflik, tantangan, sumber daya yang terbatas, persaingan pasar, dan masalah birokrasi, maka menjadi hal yang umum bagi perusahaan untuk terkoneksi dengan pemerintah yaitu dengan menunjuk anggota yang terhubung secara politik di dewan komisaris dan direksi.

Penelitian telah memperlihatkan koneksi politik dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi dengan cara yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Memang, koneksi politik dapat menyebabkan peningkatan penjualan, memfasilitasi akses ke pasar kredit, dengan tingkat bunga yang lebih rendah (Su & Fung, 2013), seringkali memberikan mekanisme perlindungan informal yang memberikan pengurangan risiko operasional dan peningkatan tingkat kinerja (Song et al., 2016). Namun, perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk berinvestasi berlebihan karena mereka memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan jangka panjang (Ling et al., 2016) dan manajer dengan koneksi semacam itu memanfaatkan hubungan ini dengan merugikan kebaikan kolektif (Saeed et al., 2016).

Selain koneksi politik, direksi luar perusahaan juga dinilai dapat mempengaruhi kinerja. Direksi dengan mayoritas direksi luar yang tidak memiliki hubungan material seperti ikatan keluarga, hubungan keuangan, pekerjaan, layanan profesional dan hubungan direktur dengan manajemen telah digambarkan sebagai independen dan efektif (Ayuso & Argandoña, 2007). Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan afiliasi antara anggota direksi dapat menimbulkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan, oleh karena itu direksi luar perusahaan diperlukan untuk mengurangi potensi tindakan yang merugikan perusahaan oleh sekelompok anggota direksi lainnya (Rahmatika & Payamta, 2019).

Fungsi pemeriksaan awal serta perbaikan yang dilakukan oleh direksi luar terhadap aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan dan didukung oleh pemantauan dari komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan, maka dapat berdampak baik terhadap perbaikan manajemen perusahaan. Selain itu, dalam menjalankan perusahaan, direksi luar perusahaan berperan penting dalam memastikan terpenuhinya peran masing-masing direksi secara objektif dan

bertanggungjawab. Peningkatan mutu tata kelola perusahaan diharapkan dapat tercapai dengan adanya direksi luar pada jajaran direksi perusahaan (Supriatna & Ermond, 2019).

Literatur tata kelola perusahaan memperlihatkan direksi luar lebih efektif daripada direksi dalam. *Resource dependence theory* menawarkan banyak alasan untuk mendukung pandangan ini. Pertama, untuk menjaga reputasi mereka, direksi luar berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, direktur non-afiliasi biasanya tidak memiliki hubungan sosial atau bisnis dengan manajemen, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan (Hermalin & Weisbach, 2003), dan mereka memiliki lebih banyak koneksi dengan sumber daya eksternal, yang bisa mendukung mereka mencapai hasil yang diinginkan (Johnson et al., 1996). Ketiga, independensi mereka diharapkan terkait dengan berkurangnya bias dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang penting untuk menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan disipliner terhadap manajemen. (Al-Gamrh et al., 2020). Komisaris independen dinilai sebagai metode yang ampuh untuk memantau kinerja manajer dan menghalangi perilaku oportunistik, karena keinginan dan minat yang meningkat dalam meninjau aktivitas manajemen dan dengan demikian menjaga reputasi perusahaan. Selain itu, reputasi mereka bergantung pada kualitas pekerjaan yang mereka lakukan, dengan penekanan khusus pada pengawasan manajerial yang solid (Fama & Jensen, 1983). Independensi terlihat secara langsung terkait dengan kemampuan dewan komisaris, karena komisaris independen menunjukkan ketidakberpihakan dan independensi yang lebih baik dalam pemeriksaan manajemen dan perilaku perusahaan (Johennesse & Budidarma, 2022).

Berdasarkan *resource dependence theory*, Muttakin & Ullah (2012) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih besar memfasilitasi pengetahuan dan keterampilan yang beragam untuk perusahaan yang berkontribusi pada keunggulan operasional perusahaan. Selain itu, penunjukan komisaris independen juga sangat penting dalam aspek ini. Mereka dapat memastikan lebih banyak transparansi bagi pemegang saham minoritas dan mereka dapat membantu

menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi bisnis dengan memberikan wawasan berharga bagi bisnis. Muttakin & Ullah (2012) menemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank Bangladesh. Berbeda dengan hasil penelitian Pathan & Faff (2013) memperlihatkan komisaris independen menurunkan kinerja bank, begitu pula dengan penelitian Mollah & Zaman (2015) dan Khalifaturofi'ah (2021) menemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki dampak negatif terhadap kinerja.

Keberagaman direktur sangat penting dalam tata kelola perusahaan, dan direktur berperan penting didalam tata kelola bank yang kompleks. (García-Meca et al., 2015). Keberagaman gender adalah salah satu bentuk keberagaman direksi. Keberagaman gender berkaitan erat dengan sikap dari masing-masing gender. Wanita lebih enggan mengambil risiko dibandingkan pria, dan karena tugas direksi berkaitan dengan pengambilan keputusan maka keberagaman gender dinilai berpengaruh terhadap direksi (Mustahidda & Wahyono, 2022).

Menurut Chijoke-Mgbame et al., (2020) keberadaan direktur wanita dalam sektor bisnis memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pria, sehingga dalam pengambilan keputusan dan implikasi ekonomi keseluruhan juga terdapat perbedaan standar penilaian etis antara pria dan wanita. Oleh karena itu, sejumlah penelitian telah menjelaskan bahwa ekonomi perusahaan khususnya kinerja perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh adanya perekrutan dan peningkatan terhadap representasi direktur wanita.

Pria dan wanita memiliki perspektif, ide, dan wawasan pasar yang beragam, sehingga memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih baik. Oleh karena itu, keberagaman gender dipandang sebagai hal yang sangat penting (Ionascu et al., 2018). Proporsi pria dan wanita di tempat kerja disebut sebagai keberagaman gender, hal ini berdampak terhadap cara individu berinteraksi satu sama lain di tempat kerja, dan kinerja organisasi (Herring, 2009).

Pendukung keberagaman gender berpendapat pada dua alasan: etika dan ekonomi. Dalam perdebatan etis, Campbell & Mínguez-Vera (2008) berargumentasi bahwa mengeluarkan wanita dari komite berdasarkan gender saja

adalah tindakan yang tidak etis. Penelitian sebelumnya di bidang ekonomi memperlihatkan mengabaikan kemampuan wanita dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Mengingat sifat lanskap bisnis kontemporer yang dinamis dan rumit, penting bagi organisasi untuk memanfaatkan kemampuan direktur wanita.

Secara umum, diasumsikan bahwa keberagaman gender meningkatkan kinerja perusahaan (Salloum et al., 2016). Penelitian Gulamhussen & Santa (2015) memperlihatkan hubungan positif antara kehadiran direktur wanita dan kinerja bank. Kabir et al., (2022) mendapati hubungan positif antara keberagaman gender dan kinerja. Sebaliknya, Kramaric & Pervan (2016) mendapati hubungan negatif antara direktur wanita dan kinerja bank.

Selain penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, alternatif pendekatan yang bisa menunjang kinerja keuangan perbankan adalah inovasi (Khalifaturofi'ah, 2021). Perusahaan memerlukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya; ini adalah strategi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif (Suwandi et al., 2023). Berdasarkan Tufano (2003), proses pengembangan dan pengenalan teknologi, instrumen, pasar, dan institusi keuangan baru disebut sebagai inovasi keuangan. Otomatisasi melalui penggunaan mobile banking, internet, dan anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan contoh inovasi keuangan dalam industri perbankan. Selain itu, inovasi keuangan juga terlihat dari semakin banyaknya jaringan ATM di perbankan.

Inovasi keuangan memungkinkan bank untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengurangan biaya dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan mereka melalui mitigasi risiko. Inovasi sangat penting sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Secara khusus, bank meningkatkan kualitasnya, dan meningkatkan kinerjanya dengan mengembangkan inovasi keuangan (Zouari & Abdelmalek, 2020).

Dikarenakan adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini memperluas dan memeriksa kembali signifikansi hubungan ini. Dengan demikian, inovasi keuangan dimasukkan sebagai variabel

moderasi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme hubungan antara variabel independen dan dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
2. Apakah direksi luar perusahaan berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
4. Apakah gender direksi berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
5. Apakah inovasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
6. Apakah inovasi keuangan dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
7. Apakah inovasi keuangan dapat memoderasi pengaruh direksi luar perusahaan terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
8. Apakah inovasi keuangan dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja bank pembangunan daerah?
9. Apakah inovasi keuangan dapat memoderasi pengaruh gender direksi terhadap kinerja bank pembangunan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis mengenai:

1. Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank pembangunan daerah
2. Pengaruh direksi luar perusahaan terhadap kinerja bank pembangunan daerah

3. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja bank pembangunan daerah
4. Pengaruh gender direksi terhadap kinerja bank pembangunan daerah
5. Pengaruh inovasi keuangan terhadap kinerja bank pembangunan daerah
6. Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank pembangunan daerah yang dimoderasi oleh inovasi keuangan
7. Pengaruh direksi luar perusahaan terhadap kinerja bank pembangunan daerah yang dimoderasi oleh inovasi keuangan
8. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja bank pembangunan daerah yang dimoderasi oleh inovasi keuangan
9. Pengaruh gender direksi terhadap kinerja bank pembangunan daerah yang dimoderasi oleh inovasi keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang berkepentingan. Inilah kelebihan penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Pengaruh Koneksi Politik, Direksi Luar Perusahaan, Komisaris Independen dan Gender Direksi terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah: Inovasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis, seperti menambahkan referensi dan wawasan bagi mahasiswa, terkhusus Pengaruh Koneksi Politik, Direksi Luar Perusahaan, Komisaris Independen dan Gender Direksi terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah: Inovasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini menganut sistematika penulisan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang memuat hal-hal sebagai berikut: konteks penelitian, fenomena yang diteliti, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis pada bab kedua mencakup berbagai topik, termasuk koneksi politik, direktur luar perusahaan, komisaris independen, gender direksi, inovasi keuangan, dan landasan teoritis serta kerangka pemikiran yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Metodologi penelitian pada bab ketiga meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis. Bagian hasil dan pembahasan pada bab keempat, berisi pemaparan subjek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan. Pada bab penutup yaitu bab lima disajikan kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan, dan saran.

